

### **Dampak Keikutsertaan Indonesia dalam Upaya Penanganan Krisis Kemanusiaan Myanmar Tahun 2017-2021**

#### ***The Impact of Indonesia's Participation in Efforts to Address the Myanmar Humanitarian Crisis 2017-2021***

**Ramaldy Krisna Indradipradana<sup>1\*</sup>, Bevita Sari<sup>2</sup>**  
Universitas Paramadina<sup>1</sup>, Universitas Pertamina<sup>2</sup>  
[Indradipradana21@gmail.com\\*](mailto:Indradipradana21@gmail.com)

Diterima 10 September 2025 | Direvisi 5 November 2025 | Diterbitkan 25 Desember 2025

#### **ABSTRACT**

*All Countries around the world desire a peaceful world, but world peace requires respect for diversity and freedom. This study argues that Indonesia's participation in efforts to address the humanitarian crisis in Myanmar from 2017 to 2021 is primarily driven by its national interest in promoting global peace and stability. The humanitarian crisis in Myanmar stems from political instability caused by discrimination. As a member of the UN, Indonesia is committed to maintaining peace and security, aligning with its goal of contributing to global peace. Indonesia's actions toward the Myanmar crisis exemplify its broader national objectives. This qualitative research uses internet-based data and the concept of national interest to assess Indonesia's role. The findings indicate that Indonesia's national interest has motivated its involvement, which has resulted in four impacts: a short-term improvement of Indonesia's image through opening access to Myanmar, a medium-term strengthening of its reputation as a Mediator-Integrator, and, in the long term, both stronger bilateral relations and enhanced diplomatic efforts to stop violence.*

**Keywords:** *Indonesia, Myanmar, Humanity, Impact*

#### **ABSTRAK**

Negara di dunia menginginkan kondisi dunia yang damai, namun perdamaian dunia dapat terwujud apabila setiap manusia dapat saling menghormati nilai keberagaman dan kebebasan. Krisis kemanusiaan di Myanmar termasuk krisis yang dipicu dari ketidakstabilan kehidupan di sektor politik yang timbul karena adanya diskriminasi. Indonesia tergabung ke dalam PBB berkomitmen dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan global yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya yakni turut melaksanakan ketertiban dunia. Upaya penanganan Indonesia pada krisis kemanusiaan Myanmar

---

*Dampak Keikutsertaan Indonesia...(Ramaldy dan Bevita) | 375*

menjadi salah satu cara mewujudkan kepentingan nasionalnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berfokus pada dampak yang diterima Indonesia dari keikutsertaannya dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar pada tahun 2017-2021 dengan pengumpulan data memanfaatkan internet-based research. Selain itu, konsep kepentingan nasional dimanfaatkan dalam penelitian ini. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan nasional telah mendorong keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar, dimana upaya tersebut menimbulkan empat dampak di antaranya meningkatnya citra positif Indonesia dalam jangka pendek karena kemampuannya membuka akses ke Myanmar, memperkuat perannya sebagai Mediator-Integrator dalam jangka menengah, serta menpererat hubungan bilateral Indonesia-Myanmar dan meningkatkan diplomasi Indonesia dalam menghentikan kekerasan dalam jangka panjang.

**Kata kunci:** *Indonesia, Myanmar, Kemanusiaan, Dampak*

## PENDAHULUAN

Perdamaian dunia merupakan situasi yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Perdamaian dunia dapat terjadi apabila setiap manusia dapat saling menghormati nilai kebebasan dan keberagaman. Sehingga, perbedaan yang beranekaragam tersebut membangun suatu budaya persatuan (Soedjatmoko, 1991). Pada tingkat global, Indonesia memainkan peranan penting dalam membangun perdamaian serta keamanan global. Peran Indonesia ini sejalan dengan tujuan Indonesia dalam pendiriannya yang terkandung pada paragraf terakhir pembukaan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Salah satu tujuannya yakni turut mengimplementasikan ketertiban dunia dengan dasar keadilan pada sektor sosial, perdamaian, dan kemerdekaan.

Indonesia termasuk salah satu negara di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sehingga Indonesia berkomitmen untuk turut mempertahankan perdamaian dan keamanan global yang sejalan dengan prinsip dan tujuan program PBB. Salah satu program yang sejalan dengan komitmen Indonesia tersebut yakni *United Nations (UN) Peacekeeping*. Keikutsertaan Indonesia dalam operasi *UN Peacekeeping* tercermin pada pembukaan UUD 1945, Undang-Undang (UU) No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Pasal 1 Piagam PBB (Pertiwi, 2019). Sementara itu di tingkat internasional, Indonesia turut serta dalam upaya perdamaian global yang terlihat dari keikutsertaan dalam konflik Israel-Hizbullah tahun 2006. Pada konflik tersebut, Indonesia berdiplomasi secara aktif dengan PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Tidak hanya itu, Indonesia juga menjalin komunikasi dengan Lebanon dan Israel via pihak ketiga untuk menekankan bahwa Indonesia sangat siap menugaskan pasukan perdamaian ke Lebanon pada kondisi tersebut (Putri & Pakpahan, 2023).

Krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi salah satu konflik yang menarik atensi dunia. Krisis ini tercermin dari aksi kekerasan militer Myanmar pada 2017 yang memicu lebih dari 740 ribu orang meninggalkan Myanmar ke negara tetangganya seperti Bangladesh (DW, 2022). Peristiwa ini terjadi karena adanya serangan dari organisasi pemberontak yang dibentuk Atta Ullah bernama *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) pada 2016 terhadap Pangkalan Markas Besar Polisi (Fair, 2018). Pemerintah Myanmar merespon aksi tersebut dengan meluncurkan operasi di Desa Gu Dar Pyin yang menewaskan sekitar 250 orang dan ratusan ribu rumah dibakar (Setiawan & Suryanti, 2021). Komisioner Tinggi PBB atau yang dikenal dengan UNHCR (2018) dalam hal ini melaporkan lebih dari 671 ribu orang etnis Rohingya mengungsi ke Cox's Bazar sejak 25 Agustus 2017. Selain itu, konflik tersebut kian meningkat dan menimbulkan korban jiwa. Hingga akhir September, Siba & Qomari'ah (2018) menyebutkan lebih dari 13 ribu jiwa tewas yang mencakup 1000 anak dengan lebih dari 60% kematiannya terjadi karena kekerasan, 9% tempat tinggal dibakar hingga korban tewas serta 5% mengalami pemukulan hingga meninggal. Dengan demikian, tahun 2017 menjadi tahun yang paling banyak terjadi kekerasan selama berlangsungnya krisis kemanusiaan di Myanmar.

Indonesia yang termasuk negara yang bertetangga dengan Myanmar di Asia Tenggara merespon krisis kemanusiaan di Myanmar dengan menetapkan kebijakan dengan pendekatan diplomatik. Pendekatan ini menyebabkan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia dapat bertemu dengan Jenderal Senior U Min Aung Hlaing sebagai Panglima Angkatan Bersenjata di Naypyidaw, Myanmar. Berdasarkan Sekretariat Kabinet (2017), pembahasan pertemuan ini berfokus pada perlindungan dalam stabilitas keamanan akibat banyaknya yang meninggal, mengalami luka-luka serta juga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, keterbukaan akses terhadap bantuan kemanusiaan juga menjadi fokus pertemuan ini agar krisis kemanusiaan di Myanmar dapat teratasi. Retno Marsudi yang menjabat sebagai Menlu Indonesia mengadakan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi selaku *State Counsellor Myanmar*. Pada pertemuan tersebut, Sekretariat Kabinet (2017) melaporkan Menlu Retno merekomendasikan formula 4+1 yang terdiri dari: (1) memulihkan kondisi menjadi aman dan stabil kembali; (2) mencegah dan menghindari penggunaan kekerasan; (3) mengamankan setiap manusia di negara bagian Rakhine, tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan suku maupun agama; (4) segera berikan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Usulan ini menghasilkan prosedur penyaluran yang diketuai Pemerintah Myanmar. Dunia internasional

yang diwakili Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB pada forum Dewan Keamanan PBB mengakui peran Indonesia karena telah mengupayakan keterbukaan akses terhadap bantuan kemanusiaan di Myanmar (Kompas, 2017).

Namun di tingkat regional, ASEAN, organisasi yang menaungi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, tidak menempatkan krisis kemanusiaan di Myanmar sebagai fokus utama agenda tahunan. Keputusan ini terjadi karena adanya prinsip non-intervensi atau tidak saling mencampuri urusan dalam negeri dari masing-masing negara anggota. Oleh karena itu, ASEAN memutuskan untuk mengemukakan dukungannya kepada Pemerintah Myanmar yang berkolaborasi dengan Palang Merah dan komunitas global guna mengadakan program kemanusiaan di Rakhine (Rosyid, 2019). Indonesia dalam hal ini terus menyuarakan agar krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi fokus utama agenda ASEAN. Hal tersebut tercermin pada saat menghadiri *ASEAN Political and Security Council (APSC)*, dimana Indonesia menyarankan sebaiknya negara anggota ASEAN mengambil peran dalam penanganan Myanmar secara holistik (Sekkab RI, 2018).

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yakni “Bagaimana dampak keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan Myanmar tahun 2017-2021?”. Selain itu, tujuan dari penelitian ini berfokus untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah terkait dampak yang diterima Indonesia dari keikutsertaannya dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan Myanmar secara eksplanatif. Pemilihan periode waktu 2017-2021 berlandaskan pada tahun 2017 menjadi tahun yang paling banyak terjadi kekerasan selama berlangsungnya krisis kemanusiaan di Myanmar dan Indonesia kian berupaya menangani krisis kemanusiaan tersebut hingga disepakatinya 5 Point Consensus ASEAN pada 2021. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tentang krisis di Myanmar dan upaya perdamaannya, namun perbedaan fokus pengkajiannya menjadi salah satu bahan sudut pandang dari penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama yakni penelitian Ipang Setiawan & Made Suryanti (2021) yang menjelaskan bahwa keikutsertaan ASEAN dalam penyelesaian konflik Rohingya didorong karena adanya tanggung jawab ASEAN untuk menghadirkan perlindungan bagi negara anggotanya. ASEAN dalam proses penanganannya teguh meyakini hak asasi manusia (HAM). Indonesia dalam hal ini membantu ASEAN dalam prosesnya dengan pendekatan *soft diplomacy*, sementara PBB membantu dengan *Responsibility to Protect*. Tidak hanya itu, ASEAN juga membentuk tim khusus untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Negara bagian Rakhine akan menjadi lokasi kerja dari tim tersebut, dimana tim tersebut akan mengusulkan empat saran seperti keamanan yang meliputi

material maupun fisik, pencatatan dari masyarakat etnis Rohingya, serta unifikasi secara sosial guna mengantisipasi konflik horizontal di Myanmar.

Sementara itu, penelitian Angga Rachmat (2022) menguraikan bahwa Indonesia di sektor politik dan keamanan memainkan peranan yang signifikan dalam kepemimpinannya di ASEAN. Kondisi di Myanmar yang mengalami krisis terjadi karena kudeta militer telah memicu kekhawatiran yang berpengaruh pada stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Indonesia pada penanganan krisis Myanmar di sektor politik menghadapi harapan akan ide serta usaha merumuskan solusi sebagai bagian penerapan kepemimpinan di sektor politik-keamanan dari kapabilitas demokrasi, pengalaman transisi demokrasi, dan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Tetapi di lain sisi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam kapasitas mengimplementasikan kepemimpinannya seperti *ASEAN WAY*, penolakan dari rakyat Myanmar, inkonsistensi hak asasi manusia, dan integrasi politik domestik. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia harus bersifat konstruktif dengan konsolidasi agenda demokrasi maupun hak asasi manusia yang memprioritaskan diplomasi non-megafon sebagai upaya penanganan krisis di Myanmar.

Tidak hanya itu, penelitian Dhimas Hartanto (2024) memaparkan bahwa eksistensi pengungsi Rohingya telah menghadirkan dua pengaruh. Dalam hal ini, tidak hanya mendorong pengaruh kemanusiaan tetapi juga memicu ancaman stabilitas pada maritim Indonesia menjadi dampak eksistensi pengungsi Rohingya. Selain itu, hubungan yang melibatkan pengungsi, lembaga internasional, dan otoritas lokal menimbulkan pengaruh terhadap dinamika keamanan di teritori yang menerima pengungsi Rohingya. Sehingga, pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional menjadi hal yang diperlukan dalam mengatasi isu pengungsi Rohingya. Pendekatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kestabilan keamanan maritim sekaligus menjamin perlindungan dan penyelesaian yang manusiawi bagi para pengungsi.

## **Kerangka Pemikiran**

### **Kepentingan Nasional**

Dalam studi Hubungan Internasional, kepentingan nasional mempunyai peran yang signifikan. Menurut Teuku Rudy (2002), kepentingan nasional merupakan sekumpulan tujuan yang ingin diperoleh negara serta berkaitan dengan kebutuhan suatu negara/bangsa atau

berhubungan dengan suatu hal yang menjadi cita-cita. Lebih lanjut, Plano & Olton (1999) melalui Kamus Hubungan Internasional menjelaskan bahwa kepentingan nasional harus termuat dalam setiap kebijakan luar negeri. Eksistensi kepentingan nasional ini menjadi hal yang krusial bagi negara karena hakikat dari pendirian suatu negara yakni untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Tidak hanya itu, Morgenthau (1948) mengartikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimal dari negara dalam mempertahankan identitas fisik, politik, maupun budayanya dari ancaman negara lain.

Sementara itu dalam bukunya, Holsti (1995) mengemukakan bahwa perumusan kebijakan luar negeri dari suatu negara harus memuat tujuan yang spesifik serta harus sejalan dengan kepentingan nasional. Lebih lanjut, kepentingan nasional dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi di antaranya *core value*, *middle-range objectives*, dan *long-range goals*. *Core value* merujuk pada sesuatu yang dinilai krusial bagi suatu negara yang berkaitan dengan kehadiran suatu negara seperti kedaulatan. *Middle-range objectives* ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Sedangkan, *long-range goals* mengacu pada kepentingan negara dalam jangka panjang sebagai suatu hal yang ideal seperti keinginan merealisasikan kondisi dunia yang damai dan tertib.

Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar mempunyai kepentingan nasional dari berbagai aspek seperti politik dan keamanan. Pada sektor politik, keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap kemanusiaan di tingkat global. Kepentingan nasional Indonesia ini juga tercermin pada implementasi baik secara langsung maupun tidak dalam penyelesaian isu pengungsi Rohingya. Selain itu, tujuan keikutsertaan Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar ini adalah untuk mengonstruksi pengakuan dari dunia internasional terhadap Indonesia. Pengakuan terhadap Indonesia yang terkonstruksi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai contoh baik dalam dunia internasional yang menyebabkan Rakhine menjadi wilayah yang aman bagi umat Muslim (Suwandari & Sugito, 2021).

Sedangkan di sektor keamanan, keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar sebagai wujud tanggung jawab Indonesia untuk mempertahankan kestabilan serta keamanan regional dari berbagai ancaman (Suwandari & Sugito, 2021). Kehadiran pengungsi Rohingya akibat krisis kemanusiaan di Myanmar menimbulkan ketidakstabilan pada keamanan dari setiap negara di kawasan Asia Tenggara. Ketidakstabilan keamanan tersebut terjadi karena masifnya gelombang pengungsi Rohingya yang memasuki negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, Indonesia menyalurkan bantuan

kemanusiaan kepada Myanmar. Penyaluran bantuan kemanusiaan bertujuan untuk meredam ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti memanfaatkan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini yang bertujuan untuk meneliti kepentingan yang melatarbelakangi Indonesia untuk menyalurkan bantuan luar negeri dalam konflik Myanmar. Creswell (2014) menyatakan metode penelitian kualitatif adalah salah satu macam metode pada penelitian yang mana peristiwa di lingkungan sosial serta instrumen dalam berpikir secara rasional seperti bahasa dimanfaatkan untuk melaksanakan analisa. Pemanfaatan metode ini bertujuan untuk menguraikan peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, Lamont (2015) menambahkan bahwa jenis metode ini mampu memvisualisasikan peristiwa yang terjadi melalui bantuan dari sekumpulan informasi berupa data yang kajiannya memanfaatkan data non-numerik. Tidak hanya itu, keikutsertaan penulis menjadi keharusan dalam penelitian bermetode ini karena dapat secara mendalam dan komprehensif dalam meneliti (Creswell, 2003).

Data primer maupun sekunder menjadi data pada penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *internet based-research* sebagai teknik penghimpunan datanya. Selain itu, Moleong (2007) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknik penghimpunan data tersebut mampu menunjang peneliti dalam mengumpulkan sejumlah data maupun informasi dari situs-situs internet dengan kredibilitas tinggi. Peneliti dapat memperoleh data primer dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI dengan teknik internet based-research. Tidak hanya itu, perolehan data sekunder pada penelitian ini berasal dari jurnal, buku, maupun dokumen yang bersumber dari instansi-instansi terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Penanganan Indonesia dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar Tahun 2017-2021**

Pada proses penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia menjalin komunikasi dengan Thaung Tun selaku *National Security Advisor* (NSA) untuk mencari sejumlah informasi terkait kondisi di Rakhine sebagai langkah awalnya. Kemudian, pertemuan

kembali dilaksanakan dengan Abul Hassan Mahmud Ali selaku Menteri Luar Negeri Bangladesh serta Kofi Annan selaku Advisor Commission on Rakhine State (Ihsanuddin, 2017). Dengan pertemuan tersebut, pembahasan terkait situasi di Rakhine dapat terjadi di antara Indonesia dan Myanmar. Selain itu, desakan terhadap Bangladesh dari Indonesia untuk membantu penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar juga terjadi saat pertemuan Indonesia dengan Bangladesh. Tidak hanya itu, desakan terhadap Indonesia untuk memastikan Myanmar agar menerapkan hasil laporan yang memuat rekomendasi terkait penanganan krisis juga terjadi saat pertemuan antara Indonesia dengan Kofi Annan pada 29 Agustus 2017 (Albayumi et al, 2018).

Selain itu ketika pertemuan Indonesia dengan Kofi Annan, Indonesia menyampaikan untuk menghadirkan rasa aman bagi setiap penduduk Rakhine termasuk masyarakat etnis Rohingya yang bertujuan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah korban dari krisis tersebut (Ihsanuddin, 2017). Sekretariat Kabinet (2017) menjelaskan bahwa Indonesia juga menyatakan kepedulian dan komitmennya yang tinggi terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disebut dengan LSM Indonesia untuk Myanmar dengan mendirikan AKIM atau Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar pada 31 Agustus 2017. Pasca pertemuan dengan Kofi Annan, Menlu Indonesia menjalin komunikasi dengan Mevlut Cavusoglu selaku Menlu Turki pada 30 Agustus 2017 untuk membahas kondisi di Rakhine (Iqbal, 2017). Menlu Indonesia kembali mendatangi Myanmar pada 4 September 2017. Kedatangan ini sebagai wujud solidaritas Indonesia terhadap permasalahan yang dihadapi Rohingya serta bertujuan untuk mengkaji solusi krisis kemanusiaan yang dihadapi Rohingya. Tidak hanya itu, kunjungan Menlu Indonesia kembali terjadi di keesokan harinya saat mendatangi Bangladesh untuk bertemu Sheikh Hasina selaku Perdana Menteri Bangladesh dan Mahoof Ali selaku Menlu Bangladesh. Kardi (2017) menjelaskan kunjungan ini berkaitan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di perbatasan.

Pada 5 September 2017, Menlu Indonesia ketika mendatangi Bangladesh tidak hanya membicarakan terkait penyaluran bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh. Indonesia dalam kunjungan ini juga mendorong Bangladesh menampung dan memberikan perlindungan kepada etnis Rohingya (Albayumi et al, 2018). Selain itu, negosiasi turut dilancarkan oleh Indonesia dengan organisasi internasional seperti organisasi internasional untuk migrasi (IOM) dan UNHCR untuk menemukan solusi bagi pengungsi Rohingya. Tidak hanya itu, Duta Besar Indonesia di Bangladesh pada 6 September

2017 bertemu dengan Menlu Bangladesh. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan bantuan tambahan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh (Albayumi et al, 2018).

Pasca menghimpun sejumlah informasi terkait kondisi Rakhine, Indonesia memperoleh kepercayaan dari Pemerintah Myanmar. Kepercayaan tersebut menyebabkan Indonesia dapat memainkan peran sebagai mediator yang menghubungkan Pemerintah Myanmar dengan dunia global. Indonesia dalam menjembatani kedua pihak tersebut menyelenggarakan dialog untuk mengatasi krisis kemanusiaan (Albayumi et al, 2018). Sementara di tingkat global, Lestari (2017) memaparkan bahwa Indonesia mendorong OKI untuk mengangkat isu kemanusiaan tersebut ke sidang umum yang diselenggarakan oleh PBB mulai dari 12 September 2017. Desakan dari Indonesia mendorong OKI membawa isu kemanusiaan di Myanmar ke sidang lanjutan PBB untuk dibahas bersama dengan negara lain pada 24 Desember 2017. OKI dalam sidang lanjutan PBB mengungkapkan resolusi untuk menangani krisis kemanusiaan, namun resolusi tersebut gagal karena China dan Rusia selaku negara yang bersahabat dengan Myanmar menolak resolusi tersebut (Teresia & Kurnianto, 2017).

**Tabel 1. Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ikut Bergabung Menjadi Anggota AKIM**

No.	Lembaga
1	Muhammadiyah Disaster Management Centre
2	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama
3	Pos Keadilan Peduli Umat – Human Initiative (PKPU-HI)
4	Dompot Dhuafa
5	Rumah Zakat
6	Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid
7	Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIZ) Wahdah
8	Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
9	Aksi Cepat Tanggap
10	Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
11	Social Trust Fund – UIN Jakarta

Sumber: Dompot Dhuafa, 2017

Sementara itu, pendirian AKIM ini terjadi dengan menggabungkan 11 organisasi kemanusiaan yang berkolaborasi dengan LSM di Myanmar untuk memberikan bantuan terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine (Dompot Dhuafa, 2017). Indonesia dengan pendirian AKIM dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya. Kehadiran AKIM menjadi solusi bagi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar karena Pemerintah Myanmar sebelumnya melarang bantuan kemanusiaan masuk ke negaranya, namun Pemerintah Myanmar kemudian membuka akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan ke negaranya. Pemblokiran penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar ini dapat terlihat ketika PBB meluncurkan bantuan kemanusiaan, namun Myanmar menolak bantuannya karena ketidakstabilan pada keamanan negara (Fisher, 2017). Pada pelaksanaannya, AKIM meluncurkan suatu program yang bernama HASCO atau Humanitarian Assistance for Sustainable Community yang berarti Bantuan Kemanusiaan untuk Komunitas Berkelanjutan. Peluncuran HASCO oleh AKIM ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat Myanmar, terutama etnis Rohingya, di sektor penyaluran tenaga ahli, pengembangan kapasitas, pemulihan, serta mata pencaharian. Selaras dengan tujuan programnya, Ali Yusuf selaku Kepala Pelaksana AKIM mengungkapkan sasaran utama program ini yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di negara bagian Rakhine yang berkaitan di berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Tidak hanya itu, dua komunitas masyarakat yakni Muslim dan Buddha menjadi target penerima manfaat dari program ini (Halim et al, 2022).

Oleh karena itu, Indonesia kemudian pada tahun 2017 mendirikan Rumah Sakit (RS) Indonesia yang berlokasi di Rakhine. Konstruksi ini terjadi akibat adanya kolaborasi antara Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Penyelamatan Darurat Medis (MER-C), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan pemerintah Indonesia. Konstruksi RS tersebut juga menjadi simbol persahabatan Indonesia-Myanmar sekaligus dorongan dari Indonesia kepada Myanmar untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama (Wapres RI, 2019). Pada 10 Desember 2019, Indonesia secara resmi menyerahkan kunci rumah sakit kepada Pemerintah Myanmar melalui Kementerian Kesehatan dan Olahraga Myanmar (MER-C, 2019). Selain itu, Indonesia juga mendirikan sekolah di dua desa di Myanmar di antaranya di Desa La Ma Chae dan Desa Thet Kay Pyia Ywar Ha yang terjadi karena adanya sumbangan kemanusiaan yang diberikan masyarakat Indonesia atas koordinasi Pos Keadilan Peduli Ummah (PKPU) (Putra, 2017). Tidak hanya itu, Rumah Zakat juga membangun sekolah di Khone Baung Village dan

Nantinya IDPs (Rusdiana, 2018). Konstruksi sekolah tersebut menjadi wujud komitmen untuk mendorong pembangunan inklusif di Myanmar (Putra, 2017).

Indonesia juga menjadi pihak penyelenggara yang mengadakan pertemuan yang terlihat dari pelaksanaan Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue (IMID) yang pertama pada 2016 sesuai dengan kesepakatan Menlu Retno Marsudi dengan Aung San Suu Kyi. IMID yang pertama digelar pada 21-24 Mei 2017 di dua kota yakni Jakarta dan Yogyakarta dengan tema “The Role of Leaders in Promoting Tolerance, Mutual Understanding and Harmony in Social Development” yang bertujuan untuk membangun relasi baik antara Indonesia dengan Myanmar guna perdamaian antar agama dan budaya dapat tercipta. Kurang lebih sebanyak 20 representasi Myanmar dan Indonesia sekaligus anggota lain seperti para Biku dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratingga Boyolali, pejabat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Yogyakarta, dan Kemenag Indonesia menghadiri IMID. Penyelenggaraan dialog ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang majemuk dengan agama, identitas, dan ras yang berbeda-beda sehingga kedua negara tersebut dapat menemukan solusi dalam menghadapi perbedaan (Pujayanti, 2018). Tidak hanya itu, diplomasi konferensi juga dilakukan Indonesia, dimana diplomasi konferensi adalah kegiatan berdiplomasi yang melibatkan pemerintah, organisasi pemerintah, maupun non-pemerintah yang bertujuan membangun kerjasama (Natasha et al, 2021). Adapun contohnya dapat terlihat pada tahun 2017, dimana Menlu Retno Marsudi mendorong OKI untuk melancarkan pendekatan dengan etnis Rohingya. Indonesia dalam hal ini menyarakan agar OKI berfokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan dan berkolaborasi secara konstruktif dengan ASEAN, Islamic Development Bank (IDB), dan Pemerintah Myanmar (Smith & Williams, 2021).

Pada tahun 2020, Indonesia telah menerima pengungsi sebanyak 99 orang etnis Rohingya yang masuk melalui perairan Aceh Utara. Penerimaan ini terjadi dengan berlandaskan pada rasa kemanusiaan. Indonesia dalam penanganan pengungsi tersebut berkolaborasi dengan UNHCR dan masyarakat Aceh Utara (BBC, 2020). Selain itu, bantuan kemanusiaan sebesar USD 200.000 juga disalurkan Indonesia dengan Myanmar sebagai negara tujuannya untuk penanganan virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre). Sekretariat Kabinet (2021) menjelaskan penyaluran bantuan kemanusiaan seperti sarung

tangan medis, alat pelindung diri (APD), dan masker KN95 sebagai wujud tindak lanjut dari kesepakatan *Five Point Consensus dalam ASEAN Leader's Meeting* pada 24 April 2021. Tidak hanya itu, penyaluran bantuan ini menegaskan kembali posisi Indonesia bahwa bantuan kemanusiaan termasuk salah satu bagian penting dalam penanganan tiga krisis yang terjadi di Myanmar yakni politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

### **Dampak Keikutsertaan Indonesia dalam Upaya Penanganan Krisis Kemanusiaan Myanmar Tahun 2017-2021**

Beragam upaya Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Indonesia memiliki kepentingan nasional yang dikandung di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satu kepentingan nasionalnya yakni turut menjalankan ketertiban dunia yang dengan berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan ini kemudian mendorong Indonesia untuk melibatkan diri dalam penanganan krisis tersebut. Indonesia melalui Retno Marsudi selaku Menlu Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk yang peduli dengan situasi kawasan dan kemanusiaan, serta ingin membangun kerja sama secara konstruktif. Tidak hanya itu, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menolong Myanmar dalam upaya reformasi dan rekonsiliasi sekaligus mendorong pembangunan inklusif termasuk penguatan demokrasi (Wardah, 2017).

Oleh karena Indonesia merupakan negara dengan keberagaman etnis di dalamnya yang dapat hidup harmonis satu sama lain, Indonesia mempunyai citra yang positif. Citra positif ini membantu Indonesia dalam memperkuat kekuatan negaranya (Fang, 2008). Eksistensi citra suatu bangsa tersebut di era globalisasi menjadi hal yang membedakan negara-negara di dunia dengan tujuan kompetitif. Tidak sedikit negara di dunia meningkatkan citra bangsa sebagai langkah untuk mengonstruksi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Keberadaan citra positif menjadi cara promosi negara untuk menarik para pemangku kepentingan eksternal maupun internal dalam berkolaborasi demi mewujudkan kepentingan nasional (Pujayanti, 2018).

Indonesia telah menjalin hubungan dengan Myanmar dari sebelum negara tersebut merdeka dengan pendekatan *constructive engagement* yang menyebabkan Indonesia menjadi negara mitra Myanmar dengan tidak memberikan kritik serta menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sehingga, pendekatan tersebut dalam jangka pendek dapat mendorong citra positif Indonesia di mata Myanmar. Selain itu, pendekatan tersebut mengakibatkan Indonesia memprioritaskan konsensus serta mencegah peperangan secara persuasif dan inklusif

(Hongwei, 2012). Indonesia dalam penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar juga memanfaatkan diplomasi yang dijalankan secara halus dan tanpa ada paksaan, sehingga Pemerintah Myanmar memberikan akses kepada Indonesia. Dengan diplomasi, Indonesia ikut serta secara aktif pada program dan kegiatan yang berkelanjutan dalam penanganan krisis kemanusiaan serta berkolaborasi dengan ASEAN dan organisasi internasional lainnya yang terlihat dari Indonesia yang memulai dialog dengan sejumlah aktor internasional dan membangun relasi dalam penanganan krisis kemanusiaan. Dialog tersebut bertujuan untuk membagikan informasi seputar kondisi terbaru di Myanmar, dimana dialog ini meningkatkan citra positif bagi diplomasi kemanusiaan Indonesia. Dengan demikian, aktor internasional dapat menilai kredibilitas Indonesia dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar (Purnama et al, 2019).

Citra positif Indonesia telah mendorong Indonesia menjadi Mediator-Integrator dalam konflik Myanmar. Peran Mediator-Integrator memperlihatkan bahwa negara dapat mengemban tanggung jawab untuk mengatasi konflik antar negara. Dalam menjalankan perannya, suatu negara bertindak secara tidak memihak dan bertanggung jawab secara khusus untuk menjalin komunikasi yang bermanfaat dari sejumlah kelompok lain (Holsti, 1970). Peran Indonesia ini tercermin pada posisi Indonesia sebagai Kawan dan pihak yang menengahi baik di tingkat kawasan maupun internasional untuk menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Myanmar menyambut baik Indonesia dengan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke negaranya, menerima bantuan dari aktor lain untuk menangani krisis kemanusiaan di Rohingya, dan mendorong demokratisasi akibat adanya peran tersebut (Purnama et al, 2019).

Selain itu, Indonesia sebagai Mediator-Integrator sukses dalam membantu penanganan krisis kemanusiaan dan memberikan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan Myanmar. Kesuksesan Indonesia ini tercermin dari Myanmar yang memberikan akses terhadap aktor internasional lain untuk terlibat dalam upaya perdamaian tersebut. Keterbukaan akses dari Myanmar tersebut menyebabkan aktor internasional seperti AHA Centre dapat ikut serta dalam upaya perdamaian di Myanmar. Keterbukaan akses dari Myanmar ini terjadi pasca adanya dorongan dari Indonesia (Purnama et al, 2019). Dengan demikian, kesuksesan tersebut mengakibatkan peran Indonesia sebagai Mediator-Integrator kian mengalami penguatan.

Indonesia dan Myanmar sebagai sesama negara anggota ASEAN merupakan negara multietnis yang mempunyai banyak kesamaan sejarah maupun budaya. Berdasarkan Kedutaan

Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar (n.d), Indonesia berkaitan dengan kemunculan krisis kemanusiaan pada 25 Agustus 2017 melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon dan Menteri Luar Negerinya menerapkan pendekatan kemanusiaan dalam mengonstruksi dan mempertahankan hubungan dengan Myanmar. Dengan pendekatan tersebut, Menlu Retno Marsudi mengusulkan dua hal dalam penanganan krisis kemanusiaan di Sidang Umum PBB ke-74 pada 24 September 2019. Dua hal yang disampaikan ini terbagi dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, Menlu Indonesia mengusulkan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Penyaluran bantuan tersebut bertujuan agar mengamankan repatriasi para pengungsi. Sedangkan dalam jangka panjang, Indonesia mendorong adanya pembangunan serta pemberdayaan di sektor sosial maupun ekonomi karena pembangunan dan pemberdayaan akan mengakibatkan situasi menjadi lebih kondusif sekaligus meningkatkan rasa aman (Geopani, 2019).

Sejalan dengan usulannya di Sidang Umum PBB, Indonesia menyalurkan sejumlah bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Salah satunya yakni yang terjadi pada 22 September 2017. Indonesia dalam hal ini menyalurkan sekitar 20ton bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Bantuan kemanusiaan dari Indonesia ini dikirimkan ke Myanmar dengan dua pesawat Hercules. Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dari Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh. Bantuan kemanusiaan tersebut berisikan makanan bayi dan ibu hamil, tenda, makanan siap saji, sarung, dan obat-obatan (Kuwado, 2017). Pengiriman bantuan ini menyebabkan hubungan bilateral Indonesia-Myanmar kian erat.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menerapkan pendekatan di sektor politik dengan Myanmar dalam penanganan krisis kemanusiaan. Presiden Joko Widodo selaku pemimpin Indonesia menjalankan diplomasi yang low profile, rekonsiliatif, dan inklusif. Indonesia dalam hal ini tidak memanfaatkan megaphone diplomacy yang tercermin dari cara Menlu Indonesia yang lebih aktif melancarkan diplomasi secara bilateral (Azizah, 2017). Pendekatan diplomasi yang low profile ini direfleksikan dari idiosinkratik pemimpin yang mengepalai suatu negara. Dalam hal ini, idiosinkratik Presiden Joko Widodo yang sederhana dan berkarakter baik mendorong Indonesia dapat menangani krisis kemanusiaan (Azizah, 2017).

Indonesia dengan pendekatan diplomasi yang inklusif menjaga secara signifikan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Myanmar. Penggunaan diplomasi tersebut bertujuan untuk membicarakan isu Rohingya dan jalinan kerja sama di sektor ekonomi. Sedangkan, diplomasi yang rekonsiliatif mengakibatkan Indonesia berupaya memulihkan dan mengatasi kondisi serta situasi di Rakhine dan mengobati hubungan di antara etnis mayoritas dan

minoritas di Myanmar (Azizah, 2017). Dengan diplomasi rekonsiliasi, Indonesia mendukung cara Myanmar untuk mengakselerasi proses demokratisasi dan reformasi. Indonesia juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Myanmar memberikan bantuan kapasitas dan kolaborasi (Azizah, 2017).

## **KESIMPULAN**

Indonesia yang berkepentingan untuk turut melaksanakan ketertiban dunia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi salah satu cara meraih kepentingan nasional tersebut. Keikutsertaan ini menghadirkan dampak positif bagi Indonesia di antaranya memperbagus citra Indonesia karena kemampuannya bertemu Myanmar yang terkenal tidak terbuka bahkan Indonesia mampu mendistribusikan bantuan kemanusiaan meskipun penolakan seringkali terjadi. Pada krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar, Indonesia memanfaatkan diplomasi tanpa menggunakan kekerasan. Sehingga, Myanmar memberikan akses dan mempersilahkan Indonesia memberikan bantuan. Dampak berikutnya yakni memperkokoh posisi Indonesia dalam konflik global sebagai Mediator-Integrator. Posisi Indonesia ini ditunjukkan dengan perannya sebagai pihak yang berkawan sekaligus penengah di tingkat kawasan maupun global. Peran tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan yang dapat menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.

Dampak selanjutnya ialah memperkokoh hubungan bilateral Indonesia-Myanmar dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke pengungsi Rohingya. Sementara itu, dampak terakhir yakni peningkatan penggunaan diplomasi di Indonesia dalam menghentikan kekerasan dan membangun kondisi yang kondusif. Dalam hal ini pertemuan antar Menteri Luar Negeri juga terjadi yang melibatkan Retno Marsudi dan Wunna Maung Lwin, pertemuan ini membahas upaya perdamaian di Myanmar. Selain itu, Menlu Retno Marsudi pada 4 September 2017 mengadakan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi selaku State Counsellor di Naypyidaw, Myanmar. Menlu Retno Marsudi juga mengemukakan formula 4+1 dan mengungkapkan kepedulian serta komitmennya terhadap LSM Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar dengan mendirikan AKIM atau Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar pada 31 Agustus 2017. Tidak hanya itu, Indonesia juga menjalankan diplomasi kemanusiaan

dengan merangkul ASEAN dalam pemberian bantuan kemanusiaan berdasarkan pada Myanmar adalah negara anggota ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albayumi, F., Hadi, N., & Susilo, D. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. *Nation State*, 1(1).
- Azizah, I. (2017). Peranan Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017). *Global Political Studies Journal*, 1(2).
- BBC. (2020). Rohingya: Cerita Penyelamatan Pengungsi yang Terdampar di Aceh Serta Dilema Antara Kemanusiaan dan Kecemburuan Sosial. Dikutip 1 Agustus 2025 dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53163613>
- Creswell, J. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd eds). London: SAGE.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th eds). London: SAGE.
- Dompot Dhuafa. (2017). Release Penanganan Konflik Kemanusiaan Rohingya dan Rakhine di Myanmar. Dikutip 27 Juli 2025 dari Dompot Dhuafa: <https://www.dompotdhuafa.org/release-penanganan-konflik-kemanusiaan-rohingya-dan-rakhine-di-myanmar/>
- DW. (2022). Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya. Dikutip 26 Juli 2025 dari DW: <https://www.dw.com/id/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya/a-62900002>
- Fair, C. (2018). Arakan Rohingya Salvation Army: Not the Jihadis You Might Expect. Dikutip 30 Mei 2025 dari Lawfare: <https://www.lawfaremedia.org/article/arakan-rohingya-salvation-army-not-jihadis-you-might-expect>
- Fang, Y. (2008). Soft Power: Power of Attraction or Confusion?. *Place Branding and Public Diplomacy*, 4.
- Fisher, J. (2017). Investigasi BBC: PBB Sengaja Hindari Angkat Masalah Rohingya di Myanmar. Dikutip 2 Agustus 2025 dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41438277>
- Geopani, M. (2019). Menlu Retno Sampaikan Krisis Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar dalam Sidang Majelis Umum PBB. Dikutip 2 Agustus 2025 dari VOA:

- <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-retno-sampaikan-krisis-kemanusiaan-di-rakhine-myanmar-dalam-sidang-majelis-umum-pbb/5098712.html>
- Halim, A., Nuraygy, A., Sulaeman, Z., & Nasyaya, A. (2022). Indonesian Government's Strategy in Humanitarian Diplomacy to Myanmar in the Rohingya Conflict in 2017. *Fetrian*, 4(1).
- Hartanto, D. (2024). Implikasi dan Dampak Berlabuhnya Pengungsi Rohingya di Daratan Indonesia Terhadap Keamanan Maritim: Studi Kasus dan Analisis Potensial Ancaman. *Saintara*, 8(2).
- Holsti, K. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3).
- Holsti, K. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hongwei, F. (2012). ASEAN's "Constructive Engagement" Policy toward Myanmar. *China International Studies*.
- Ihsanuddin, I. (2017). Bantu Rohingya, Menlu Retno Akan Terbang ke Myanmar. Dikutip 27 Juli 2025 dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/16594071/bantu-rohingya-menlu-retno-akan-terbang-ke-myanmar>
- Iqbal, M. (2017). Menlu Turki hingga Kofi Annan Telepon Retno Minta RI Bantu Rohingya. Dikutip 28 Juli 2025 dari Kumparan: <https://kumparan.com/kumparannews/menlu-turki-hingga-kofi-annan-telepon-retno-minta-ri-bantu-rohingya/full>
- Kardi, D. (2017). Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya. Dikutip 28 Juli 2025 dari CNN: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170906002430-106-239709/di-bangladesh-menlu-retno-bahas-pengungsi-rohingya>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar. (n.d.). Hubungan Bilateral Indonesia-Myanmar. Dikutip 3 Agustus 2025 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar: <https://kemlu.go.id/yangon/kebijakan/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar>
- Kompas. (2017). Sekjen PBB Puji Peran Penting Indonesia di Myanmar. Dikutip 28 Juli 2025 dari Kompas: <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/30/10345051/sekjen-pbb-puji-peran-penting-indonesia-di-%20myamar>

- Kuwado, F. (2017). Bantuan Indonesia untuk Rohingya Tiba di Myanmar. Dikutip 1 Agustus 2025 dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/07391491/bantuan-indonesia-untuk-rohingya-tiba-di-myanmar>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE.
- Lestari, R. (2017). Indonesia Akan Bawa Konflik Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB. Dikutip 29 Juli 2025 dari Okezone: <https://news.okezone.com/read/2017/09/05/337/1769735/indonesia-akan-bawa-konflik-rohingya-ke-ktt-ok-i-dan-sidang-umum-pbb>
- MER-C. (2019). Rumah Sakit Indonesia di Rakhine State, Diserah Terimakan. Dikutip 4 Agustus 2025 dari MER-C: <https://mer-c.org/rs-indonesia/rumah-sakit-indonesia-di-rakhine-state-diserah-terimakan>
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knoff.
- Natasha, C., Fauzan, M., Rhea, G., Putro, P., Lulu, I., & Yasmeen, E. (2021). Diplomasi Konferensi Indonesia terkait Konflik Etnis Rohingya di Myanmar. *Sentris*.
- Pertiwi, N. (2019). Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Dikutip 29 Juli 2025 dari Researchgate: [https://www.researchgate.net/publication/330278935\\_Peran\\_Indonesia\\_dalam\\_Perdamaian\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/330278935_Peran_Indonesia_dalam_Perdamaian_Dunia)
- Plano, J. & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Putra A Bardin.
- Pujayanti, A. (2018). Interfaith Dialogue Soft Power Diplomasi Indonesia dalam Isu Rohingya. *Kajian*, 23(4).
- Purnama, C., Dermawan, W., & Akmaluddin, G. (2019). Indonesia's Role Towards Myanmar in Assisting to Resolve the Humanitarian Crisis in Rohingya (2014-2018). *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4).
- Putra, L. (2017). Indonesia Bangun Dua Sekolah di Rakhine Myanmar. Dikutip 4 Agustus 2025 dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/22/22412041/indonesia.bangun.dua.sekolah.di.rhakine.myanmar>
- Putri, S. & Pakpahan, S. (2023). Kontribusi Indonesia dalam Pengiriman Pasukan Perdamaian pada Misi Maritime Task Force (MTF) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). *JOM FISIP*, 10(1).

- Rachmat, A. (2022). Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Indonesia dalam Bidang Politik-Keamanan di ASEAN pada Krisis Politik Myanmar Tahun 2021. *Jurnal Dinamika Global*, 7(2).
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3).
- Rudy, T. (2002). *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusdiana, A. (2018). Bersama AKIM, Rumah Zakat Dirikan 3 Sekolah untuk Rohingya Myanmar. Dikutip 4 Agustus 2025 dari Rumah Zakat: <https://www.rumahzakat.org/bersama-akim-rumah-zakat-dirikan-3-sekolah-untuk-rohingya-di-myanmar/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2017). Bertemu Panglima AB Myanmar, Menlu Retno Minta Segera Hentikan Kekerasan di Rakhine State. Dikutip 25 Juli 2025 dari Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/bertemu-panglima-ab-myanmar-menlu-retno-minta-segera-hentikan-kekerasan-di-rakhine-state/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2017). Selesaikan Krisis di Rakhine State, Menlu Retno Sampaikan Usulan Formula 4+1 Kepada Suu Kyi. Dikutip 25 Juli 2025 dari Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/selesaikan-krisis-di-rakhine-state-menlu-retno-sampaikan-usulan-formula-41-kepada-suu-kyi/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2018). Pimpin Delegasi Indonesia, Wiranto Ingatkan ASEAN Ambil Bagian Selesaikan Masalah di Myanmar. Dikutip 4 November 2025 dari Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/pimpin-delegasi-indonesia-wiranto-ingatkan-asean-ambil-bagian-selesaikan-masalah-di-myanmar/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2021). Indonesia Berikan Dukungan 200 Ribu Dolar AS untuk Penanganan COVID-19 di Myanmar. Dikutip 5 Agustus 2025 dari Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/indonesia-berikan-dukungan-200-ribu-dolar-as-untuk-penanganan-covid-19-di-myanmar/>
- Setiawan, I. & Suryanti, M. (2021). Keikutsertaan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017-2019). *Politicos*, 1(2).
- Siba, M. & Qomari'ah, A. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Islamic World and Politics*, 2(2).

- Smith, C. & Williams, S. (2021). Why Indonesia Adopted ‘Quiet Diplomacy’ over R2P in the Rohingya Crisis: The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and ASEAN. *Global Responsibility to Protect*, 13(2-3).
- Soedjatmoko, S. (1991). *Soedjatmoko dan Keprihatian Masa Depan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suwandari, H. & Sugito, S. (2021). The Strategy of Indonesia Diplomacy Efforts and National Political Interests in the Ethnic Rohingya Refugee Conflict. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 3(2).
- Teresia, A. & Kurnianto, K. (2017). JK Bahas Rohingya Bersama Pemimpin Negara OKI di Sela Sidang Umum PBB. Dikutip 27 Juli 2025 dari Kumparan: <https://kumparan.com/kumparannews/jk-bahas-rohingya-bersama-pemimpin-negara-oki-di-sela-sidang-pbb/full>
- UNHCR. (2018). JRP for Rohingya Humanitarian Crisis: March-December 2018. Dikutip 25 Juli 2025 dari UNHCR: <https://www.unhcr.org/us/sites/en-us/files/legacy-pdf/5ab8e23a7.pdf>
- Wardah, F. (2017). Indonesia Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan bagi Myanmar. Dikutip 4 November 2025 dari VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-luncurkan-program-bantuan-kemanusiaan-bagi-myanmar/4009802.html>
- Wakil Presiden RI. (2019). Pembangunan RS Indonesia di Rakhine, Wujud Persahabatan Indonesia-Myanmar. Dikutip 5 Agustus 2025 dari Wapres RI: <https://www.wapresri.go.id/pembangunan-rs-indonesia-di-rakhine-wujud-persahabatan-indonesia-myanmar/>